SIARAN PERS

JAGA PESISIR PANTURA, PELINDO DUKUNG PEMULIHAN EKOSISTEM MANGROVE DI DEMAK

Admin -- 22 October 2026

Demak, 20 Oktober 2026 – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung perlindungan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) melalui penyediaan 2.500 bibit mangrove dan 900 unit HexBRIck di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10).

Dukungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions (NbS) yang diprakarsai

Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Program ini mengintegrasikan pemulihan ekosistem alam dengan pembangunan infrastruktur pelindung pantai untuk menghadapi ancaman abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir rob.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, perlindungan pesisir Pantura membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan investasi, agar kawasan pesisir tetap terlindungi dan keberlanjutan kehidupan masyarakat serta perekonomian dapat terjaga.

“Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk mendorong keterlibatan investasi, dengan tujuan melindungi kawasan pesisir Pantura agar tidak semakin terdampak abrasi dan penurunan muka tanah yang meningkatkan risiko banjir rob. Di Desa Timbulsloko, direncanakan penanaman mangrove hingga 202 hektare, yang akan dilengkapi dengan pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono.

Ia menambahkan, pembangunan perlindungan pesisir harus direncanakan dengan memperhatikan aspek teknis sekaligus keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya para nelayan. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kawasan industri, kawasan logistik, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

“Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kawasan industri, kawasan logistik, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Mari kita kawal bersama upaya perlindungan pesisir Pantura dan pembangunan Giant Sea Wall, yang dimulai dari langkah nyata seperti penanaman mangrove,” tambahnya.

Direktur Hubungan Kelembagaan Pelindo Hendri Ginting mengatakan, perlindungan pesisir memiliki arti strategis bagi Pelindo karena berkaitan erat dengan ketahanan infrastruktur pelabuhan dan kelancaran rantai logistik nasional.

“Perlindungan pesisir tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga dengan keberlangsungan aktivitas kepelabuhanan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Melalui kolaborasi ini, kami berharap pemulihan ekosistem pesisir dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dan jaringan logistik nasional,” ujar Hendri.

Menurutnya, ancaman banjir rob yang kerap terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, menunjukkan pentingnya perlindungan pesisir untuk menjaga aksesibilitas pelabuhan dan kelancaran distribusi barang. Karena itu, pemulihan ekosistem pesisir menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan operasional pelabuhan dan aktivitas ekonomi.

Partisipasi Pelindo juga merupakan bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya dalam mendukung pelestarian lingkungan dan memberikan

manfaat bagi masyarakat. Melalui sinergi pemerintah, BUMN, lembaga terkait, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat mendorong perlindungan pesisir yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan kawasan Pantura.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, M.P.A., M.B.A., serta Bupati Demak dr. Hj. Eisti'anah, S.E. Pada kesempatan tersebut, Direktur Hubungan Kelembagaan Pelindo Hendri Ginting turut mendampingi Menteri Koordinator dalam penanaman mangrove secara simbolis. Turut hadir jajaran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, pimpinan BUMN, serta mitra kolaborasi.